

DINAMIKA KOMUNALISME DI INDONESIA DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Oleh: Agustinus Pratisto Trinarso

Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

Abstrak

Tulisan ini mencoba menyingkap dinamika komunalisme di Indonesia dalam sejarah bangsa dan mencoba mengkajinya dalam ranah pemikiran filosofis. Komunalisme berbasis pada paham kekeluargaan, kedaerahan, agama, identitas suku dan lainnya sebagai pengikat dan pendorong setiap individu untuk lebih mengutamakan komunitas dibanding kepentingan dirinya sendiri sebagai individu. Komunalisme sangat berkaitan dengan kebijakan publik karena komunalisme selalu mengatasnamakan demi kepentingan umum dalam membuat kebijakan publik dan komunalisme menuntut ketaatan semua warga negara untuk melaksanakan kebijakan publik. Komunalisme di Indonesia bukanlah representasi kesadaran setiap individu atas hak dan kewajibannya, melainkan representasi identitas komunal/komunitas, sehingga siapa yang menjadi pemimpin dan tokoh komunal akan menentukan kebijakan publik.

Kata Kunci: Komunalisme, Kebijakan, Publik

Abstract

This paper tries to uncover the dynamics of communalism in Indonesia in the history of the nation and tries to study it in the realm of philosophical thought. Communalism is based on kinship, regionalism, religion, ethnic identity and others as a binding and impetus for each individual to prioritize the community over his own interests as an individual. Communalism is closely related to public policy because communalism always acts on behalf of the public interest in making

public policy and communalism demands the obedience of all citizens to carry out public policy. Communalism in Indonesia is not a representation of each individual's awareness of their rights and obligations, but a representation of communal / community identity, so that who is the leader and communal figure will determine public policy.

Keywords: Communalism, Policy, Public

1. Pendahuluan

Kekalahan Gubernur Petahana Ahok dalam pilkada Gubernur DKI tahun 2017 menunjukkan kuatnya komunalisme agama di negara Indonesia dewasa ini. Pihak yang berwajib menyerah pada desakan komunalisme agama untuk menjebloskan Ahok dalam penjara dan berlaku sebagai pesakitan dengan dalih penodaan agama. Isu penodaan agama menjadi komoditi untuk membangun kekuatan komunalisme yang mengarah pada proses hukum pada ranah kebijakan publik. Fenomena menguatnya komunalisme di Indonesia yang tidak lagi berbasis budaya menunjukkan adanya dinamika baru dalam komunalisme di Indonesia. Tulisan ini mencoba menyingkap dinamika komunalisme di Indonesia dalam sejarah bangsa dan mencoba mengkajinya dalam ranah pemikiran filosofis.

2. Pengertian Komunalisme

a. Pengertian Umum

Komunalisme bukanlah sebuah paham ideologi yang dicituskan oleh seorang pemikir. Komunalisme merupakan sebuah pengertian atas realitas dimana seorang individu lebih mengutamakan kebenaran komunitasnya dibanding kebenaran lainnya. Komunalisme, secara etimologis, berasal dari kata bahasa latin *communere*, yang terdiri dari kata *co* yang berarti bersama dan *munere* yang berarti tinggal atau hidup. *Communere* berarti tinggal bersama atau hidup bersama. Dari akar kata tersebut, berkembang menjadi kata *communio* yang berarti persekutuan; kata *comuni* yang berarti kerukunan dan hubungan yang erat satu dengan yang lainnya. *Communere* dalam bahasa inggris menjadi kata *common*, yang artinya berlaku umum atau sesuatu yang dimiliki secara umum dan digunakan secara bersama-sama; *commune* yang berarti kelompok yang hidup bersama; *community* atau komunitas yang berarti kelompok, perhimpunan atau masyarakat. *Communal* berarti sesuatu yang berhubungan dengan yang umum, dibedakan dengan yang privat atau individu. Secara budaya, tanah komunal (*communal land*), pada masa dahulu di Nusantara sebagian besar dimiliki dan dikelola secara bersama-sama

oleh warga masyarakat adat.

Pengertian komunalisme mendapatkan tambahan –isme- menunjukkan adanya sebuah paham atau adanya aliran pemikiran ideal yang mengkategorikan asas-asas pengutamaan kelompok atau komunitas di atas kepentingan individu. Komunalisme berdekatan dengan pengertian sektarian, yang menunjukkan bobot sekte atau kelompok menjadi prioritas dibanding kepentingan yang lainnya. Pengertian komunalisme lebih mudah di pahami dengan disandingkan pada pengertian kelompok mafia, triad atau geng dimana kepentingan individu lebur dalam kepentingan kelompok. Komunalisme berbasis pada paham kekeluargaan, kedaerahan, agama, identitas suku dan lainnya sebagai pengikat dan pendorong setiap individu untuk lebih mengutamakan komunitas dibanding kepentingan dirinya sendiri sebagai individu.

Dalam pengertian ilmu antropologi, pengertian komunalisme berkaitan dengan pengertian kelompok dan ciri-cirinya, yang menunjukkan manusia sebagai salah satu makhluk hidup di dunia membangun persekutuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan hidup dirinya dan kelompoknya sebagai ras manusia di tengah makhluk hidup lainnya. Kelakuan binatang dalam berkelompok berakar dari naluri (*animal behavior*). Sedangkan sistem pembagian kerja, aktivitas kerja sama, dan berkomunikasi dalam kehidupan berkelompok manusia tidaklah bersifat naluri.¹ pada manusia hal tersebut menjadi tingkah laku yang dijadikan miliknya melalui belajar (*learned action*). Selain adanya kerjasama, ketergantungan antar anggota kelompok dan komunikasi sebagai ciri-cirinya, juga disebutkan bahwa dalam kelompok ada sikap diskriminasi terhadap individu di luar kelompoknya. Komunalisme cenderung dapat dinilai sebagai adanya pengutamaan komunitas oleh setiap individu sebagai anggotanya dan dikriminasi atas kelompok lainnya.²

Pengertian Komunalisme dibedakan dengan Komunisme. Komunalisme merupakan sebuah pengertian yang lebih menitikberatkan pada kepentingan kelompok daripada kepentingan individu, sedangkan komunisme merupakan sebuah paham ideologi yang mencita-citakan adanya suatu keadaan yang sejahtera adil dan merata bagi semua warga negara, dimana terjadi persamaan kelas dalam ekonomi dan politik.

b. Pengertian Komunalisme Menurut Para Filsuf

Hegel, seorang filsuf Jerman dikenal memiliki pemikiran tentang komunalisme yang disebut komunalisme hegelian. Pemikirannya tentang komunalisme merupakan sebuah pemikiran yang mendasarkan pada dialektika roh di mana hid-

1 Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 110.

2 Komunalisme dalam pengertian Antropologi lebih menekankan pada ikatan tempat (locality) dan rasa identitas komunitas (community sentiment). Lihat pemahaman R.M. Maciver dan C.H. Page tentang konsep *community* pada catatan kaki Koentjaraningrat, *Ibid.*, hlm. 119.

up komunal dalam komunitas (*Zivilgesellschaft*) merupakan antitesis dari entitas keluarga.³ Individu lepas dari keluarga dan masuk dalam komunitas dengan segala kebebasannya memenuhi segala hal yang dibutuhkan bagi kehidupannya. Komunitas hegelian adalah komunitas kebutuhan yakni setiap individu hidup dalam komunitas demi pemenuhan kebutuhannya masing-masing. Komunitas dibutuhkan demi terpenuhinya kebutuhan individualnya. Menurut Hegel, dalam masyarakat warga, terdapat subjektivitas tetapi kolektivitas tidak ada, sebaliknya dalam keluarga, kolektivitas ada, tetapi subjektivitas tidak ada. Benturan antar kepentingan individu diselesaikan oleh hadirnya negara yang mengatur kepentingan umum. Dengan demikian, negara menjadi puncak dari dialektika roh karena menjadi pusat yang mengatur kehidupan komunitas dan individu melakukan negosiasi dan evaluasi kebebasannya demi kepentingan umum.⁴

Pemikiran Hegel atas komunitas melebihi pemikiran Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa individu lain merupakan ancaman bagi kepentingan suatu individu sehingga negara perlu menjadi pengatur yang kuat dan dominan bagi semua individu.⁵ Pemikiran Hegel berbeda dengan pemikiran John Locke, yang menganut paham trias politika, dengan melihat bahwa negara lahir karena kontrak antar individu yang bebas merdeka. Negara bergantung pada masyarakat warga dan bukan sebaliknya. Negara adalah bagian dari komunitas yang mengatur hak dan kewajiban warga negara agar kehidupan komunitas dapat berlangsung dengan baik. Hak-hak individu dibatasi oleh negara demi kepentingan umum.

Pemikiran Rousseau atas komunalisme lebih mendekati paham yang sesungguhnya atas komunalisme yakni setiap individu mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan umum di atas kepentingan individu karena kepentingan negara merupakan kepentingan umum dan semua niat dan kepentingan individu perlu diselaraskan dengan kepentingan negara sebagai sang penjamin adanya kepentingan umum yang dijamin pasti berguna dan bermanfaat bagi kepentingan individu. Komunalisme Rousseau memberikan peluang pada hadirnya diktator pada elite

-
- 3 Hegel melihat bahwa keluarga menjadi belenggu subjektivitas, maka defisit subjektivitas dalam keluarga menjadi pendorong munculnya masyarakat karena manusia tidak semata-mata sebuah kolektivitas saja tapi juga individualitas partikular yang memiliki subjektivitas masing-masing. Lih. Fitzeral K. Sitorus, "Masyarakat Warga" dalam pemikiran G.W.F. Hegel", dalam F. Hardiman (ed.), *Ruang Publik*, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm. 137-138.
 - 4 Negara merupakan representasi dari sintesis yang berasal dari dialektis unsur keluarga dan masyarakat warga, sehingga prinsip universalitas dijunjung sekaligus prinsip partikularitas didorong berkembang sepenuhnya. Lih., Sitorus, *Ibid.*, hlm. 139.
 - 5 Negara Leviathan dalam pemikiran Hobbes menggambarkan manusia dalam keadaan ekstrem individualisme dan hubungan sosial merupakan hubungan konflikual sehingga negara atau Leviathan merupakan agen atau pencipta masyarakat warga. Lih. R. Haryono isman, "Masyarakat Warga" dalam pemikiran Antonio Gramsci", dalam F. Hardiman (ed.), *Ruang Publik*, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm.172.

ideologis yang berkuasa.⁶

Pemikiran Antonio Gramsci, yang terpengaruh oleh pemikiran Karl Marx, melihat bahwa komunitas bukanlah dilihat dari segi politik dan persamaan kelas saja. Gramsci melihat komunitas merupakan penentu adanya perubahan dalam kekuasaan dan politik, namun yang diutamakan adalah hegemoni komunitas tersebut dan pengaruhnya dalam perubahan kebijakan publik. Gramsci tetap melihat adanya dialektika antar kelompok dalam masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan negara, namun dialektika yang ada bukanlah bersifat revolusioner seperti dalam pemikiran Karl Marx yang ingin mengubah struktur masyarakat secara radikal. Gramsci melihat bahwa masyarakat dan budayanya bukanlah sekedar struktur melainkan sebuah superstruktur. Gramsci lebih mengutamakan melihat bahwa pemikiran kelompok yang berpengaruh akan mampu dijadikan sebagai pemikiran universal yang dapat diterima oleh kelompok lainnya sehingga hegemoni kelompok dapat mengubah kebijakan publik dan menjadi prioritas kepentingan umum. Gramsci melihat bahwa pemikiran komunalismenya melebar dari sekedar wilayah politik dan mencakup tentang pentingnya kebudayaan dan hal-hal yang lebih fundamental dari masyarakat. Gramsci melihat hal-hal yang politis (*the political*) diperluas untuk sampai pada hal-hal yang budaya (*the cultural*). Yang budaya, yang sehari-hari dianggap memiliki nilai politis, justru memiliki nilai strategis. Pemikiran Gramsci lebih mendekati pemikiran komunalisme timur yang melihat negara dan pemimpinnya merupakan pengatur masyarakat yang menduduki posisi sentral dan menentukan, “*..di Timur, negara adalah segalanya, masyarakat warga merupakan sesuatu yang primordial dan tidak mantap; di Barat ada hubungan yang jelas antara negara dan masyarakatnya. Ketika negara terguncang, tersingkaplah struktur masyarakat yang kokoh.*”⁷ Bagi Gramsci, ketika ada hegemoni dari suatu kelompok yang berpengaruh, maka tindakan militer dan politik mendapatkan pembenarannya secara hukum dan maknanya sehingga tidak menimbulkan gejolak dan balasan dari kelompok lain yang dihancurkan atau ditaklukkannya. Kedudukan dan pengaruh kelompok sebagai komunalisme mendahului perubahan dalam gerakan di masyarakat. Kelompok yang memegang pengaruh akan mempengaruhi kebijakan publik, demikian menurut Gramsci. Membangun hegemoni kelompok dan pengaruhnya terhadap seluruh masyarakat merupakan langkah imperatif dalam konteks perjuangan politik.⁸

⁶ Negara, menurut Rousseau, adalah republik, yang berarti urusan umum, urusan seluruh rakyat, dalam kedaulatan rakyat. Tujuan tenagara melampaui tujuan masing-masing individu. Individu mau berkorban demi rakyat dan negara. Lih. Franz Magnis-Suseno, “Masyarakat Warga” dalam pemikiran Locke, Rosseau dan Hegel”, dalam F. Hardiman (ed)., *Ruang Publik*, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm.115.

⁷ R. Haryono Isman, *Op.Cit.*, hlm. 180. Lihat juga Frederick Powell, *The Politics of Civil Society*, Bristol UK: The Policy Press of University of Bristol, 2007, hlm. 81.

⁸ R. Haryono Isman, *Op.Cit.*, hlm. 178.

3. Komunalisme di Indonesia

Thamrin Amal Tomagola dalam tulisannya yang berjudul “*Nasionalisme dalam Haribaan Komunalisme Indonesia*”⁹ menengarai bahwa komunalisme di Indonesia merupakan hal yang perlu diwaspadai bagi keberadaan nasionalisme Indonesia. Thamrin menyatakan sebagai berikut, “*komunalisme di seantero Nusantara ini tetap kuat mengakar bahkan bagai mendapatkan tenaga dan momentum baru untuk bangkit, dan dengan itu mengancam nasionalisme, yang terus-menerus sesak-napas tererosi. Semangat nasionalisme Indonesia dalam wujud rasa kekitaan- Persatuan Indonesia- yang telah berproses sejak Abad ke 9 (Sriwijaya) dan abad ke 14 (Majapahit) ternyata dengan mudah meluntur dengan kecepatan yang sangat menguatkirkan dalam lima tahun terakhir ini*’.¹⁰ Kecemasannya atas menguatnya komunalisme atas nasionalisme dapat di lihat dalam sejarah bangsa Indonesia mulai awal terbentuknya hingga saat ini.

Komunalisme di Indonesia, menurut Thamrin, merupakan komunalisme yang menjunjung tinggi keutuhan dan supremasi kolektif, baik agama maupun suku dan komunalisme tersebut memiliki empat ciri yang menonjol, yaitu:

Pertama, keterkaitan yang sangat erat antara berbagai bidang kehidupan di satu pihak dan di antara setiap warga dengan kelompok. Konsep tentang manusia bukan hanya sebagai makhluk ekonomi saja namun konsep manusia sekaligus sebagai makhluk ekonomi, makhluk sosial dan sebagai makhluk Tuhan. Setiap individu hanya berarti dan menemukan artinya dalam kebersamaan dengan kelompoknya.

Kedua, dalam kehidupan komunalisme, kehadiran dan pengaruh dari dunia adi-kodrati (supernatural) terasa ada dan hadir di mana-mana. Tuhan tidak hanya menciptakan manusia tetapi juga menampakkan keberadaannya dalam diri manusia. Tuhan ada di setiap sudut dari alam fisik, alam raga dan alam sosial. Apa saja yang dimiliki manusia adalah milik Tuhan dan datang dari Tuhan, termasuk kekuasaan pemimpin juga diyakini berasal dari pemberian Tuhan. Manusia sebagai pemimpin ditempatkan sebagai wakil Tuhan di dunia.¹¹ Dalam konteks komunalisme yang semacam itu, para tokoh agama dan aliran kepercayaan memiliki

⁹ Thamrin Amal Tomagola, *Nasionalisme dalam Haribaan Komunalisme Indonesia*, Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, dalam laman www.komunitasdemokrasi.or.id/id/berita/121-komunalisme-berbaju-nasionalisme. Diunduh pada tanggal 30/09/2018. Dr. Thamrin Amal Tomagola (lahir di Galela, Halmahera Utara, Maluku Utara, 17 April 1947) adalah sosiolog dari Universitas Indonesia.

¹⁰ Thamrin, *Ibid.*

¹¹ Serat Centini menggambarkan raja sebagai dalang sejati yang berhak mengatur kehidupan dengan menerima mandat dari Tuhan, “Pan ki dhalang sejatining ratu, sang ratu gantyaning nabi, nabi gantyaning Hyang Agung, ratu-nabi prasasating Hyang Maha Agung kang kadular”, yang berarti “dalang sejati itu raja sendiri, ia sendiri adalah wakil nabi, nabi adalah wakil Allah yang Maha Agung, raja-nabi adalah perwujudan Allah yang dapat dilihat’. Menurut Kitab Wulang Reh, Raja adalah penguasa kinarya wakiling Hyang Agung”, bertindak sebagai wakil Allah. Lih. G. Moedjanto, M.A., *Konsep Kekuasaan Jawa*, Yogyakarta: Kanisius, 1987, hlm. 81. Bandingkan dengan pendapat Rudiaji Mulya, *Feodalisme dan Imperialisme di era Global*, Jakarta: Elex media Komputindo, 2012, hlm. 116.

peranan yang sangat menentukan dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Individu harus dan sudah sepantasnya tunduk pada tokoh agama dan kepercayaan yang berperan sebagai wakil Tuhan yang melembaga.¹²

Ketiga, kehidupan komunalisme sangat tegas dan sekaligus peka dengan batas-batas wilayah dan identitasnya. Setiap komunitas suku, agama dan kepercayaan merupakan suatu kebulatan yang utuh dengan keyakinan yang khas dan wilayah yang jelas batas-batasnya.

Keempat, batas teritori juga dipertegas dengan identitas budaya yang dapat dikenali melalui bahasa yang digunakan dan adat-istiadat yang khas oleh suatu suku masyarakat tertentu.

Agama, kepercayaan dan etnis di Indonesia hidup dalam kaitan yang erat dengan negara. Oleh karena itu, para pemimpin agama dan suku sangat berperan sebagai aktor utama dalam politik komunitas (*political community*) dan penentu kebijakan publik.

4. Dinamika Komunalisme di Indonesia

Pada tahun 1848, negara Belanda mengesahkan Konstitusi baru bagi negaranya yang mengusung sejumlah gagasan liberalisme. Gagasan tersebut memiliki pengaruh terhadap wilayah jajahannya, termasuk Indonesia.¹³ Kelompok-kelompok sosial kota yang terdidik menyambut gagasan-gagasan import tersebut dengan antusias. Mereka bukan saja berasal dari beragam suku dan agama tetapi juga datang dari beragam ras seperti: Indo-Belanda, Cina, India dan Arab. Sejarah menunjukkan bahwa kaum terdidik di perkotaan inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal kelas menengah Indonesia yang berperan kuat sebagai *the founding fathers* dalam melahirkan negara dan bangsa Indonesia di tahun 1945.

Nasionalisme negara hanya subur di kalangan penyelenggara negara dan disebarkan secara masif oleh perangkat birokrasi sipil dan militer, serta di sebagian kalangan terdidik yang menjadi pegawai negeri. Sebaliknya, pada lapisan masyarakat yang lain dan di banyak pelosok wilayah Indonesia yang tetap tumbuh subur adalah komunalisme agama dan etnis. Sejak datangnya Jepang yang memprovokasi masyarakat Indonesia dengan strategi merangkul umat Islam untuk berhadapan dengan Belanda yang diberi stigma kafir, maka, berbagai lembaga

¹² Dalam masyarakat Jawa dikenal hubungan antara rakyat sebagai kawula dengan Raja sebagai Gusti dalam bentuk jumbuhing kawula-Gusti. Hal ini sebenarnya gambaran mistik agama yang menunjukkan persatuan antara manusia dan Tuhan. Ketaatan rakyat terhadap Raja atau pemimpin harus mirip dengan ketaatan manusia terhadap Tuhan. Lih. G. Moedjanto, *Ibid.*, hlm. 81.

¹³ Golongan Liberal di negeri Belanda mulai menggugat pnetrapan politik pemerasan tanah jajahan oleh pemerintah Belanda, yang mana didalamnya terselip pula tuntutan perbaikan pendidikan bumiputra Indonesia. Akibat gugatan golongan liberal timbul gagasan perubahan dalam bidang pendidikan termasuk bagi orang-orang di tanah jajahan. Gagasan pendidikan untuk bumiputra diwujudkan dengan dikeluarkannya surat keputusan raja Belanda tahun 1871. Lih. *Sejarah kebangkitan Nasional Jawa Timur*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978, hlm. 11.

birokrasi sipil dan juga militer sampai titik tertentu, telah dirembesi oleh virus komunalisme agama dan komunalisme etnis. Pilar-Pilar individualisme dan sosialisme Barat yang menjadi dua pilar utama dari nasionalisme hanya marak hidup di kalangan terdidik secara Barat di perkotaan. Di daerah pedesaan dan pedalaman, yang tetap tegak dengan kokoh adalah komunalisme agama dan kesukuan.

Pada era BPUPKI, menurut Tamrin Amal Tomagola, di panggung nasional terdapat dua kelompok elit terdidik yang sama sekali berbeda dalam orientasi dan pola pikir tentang negara. Kelompok yang pertama adalah kelompok pemikir berbasis pemikiran komunal (*communal-based thinkers*). Kelompok tersebut didominasi oleh mereka yang berlatar-belakang budaya Jawa yang tercerah (*enlightened Javanese*). Kecenderungan berpikir mereka adalah menjunjung tradisi ketimuran, mementingkan paham hidup kolektif yang dirumuskan dalam asas kekeluargaan dan sangat menganjurkan pengorbanan individu untuk kepentingan bersama. Pemikiran tersebut menunjukkan ciri komunalisme. Tokoh utama dari kelompok pertama ini adalah Prof. Dr. Soepomo.¹⁴

Kelompok kedua adalah kelompok pemikir yang berbasis pemikiran sosial (*societal-based thinkers*). Kelompok tersebut didominasi oleh mereka yang pernah mendapatkan pendidikan ala Belanda atau yang pernah bermukim di Belanda. Mereka tidak sekedar mendapat pendidikan barat yang menghargai pluralisme dan individualisme tetapi mereka juga mengalami dan menghayati dalam denyut kehidupan nyata apa artinya pluralisme dalam alam pikir liberal yang dipraktekkan baik dalam bidang ekonomi maupun dalam sepaik-terjang politik. Wawasan mereka terhitung cukup luas dan tidak terpola dalam batas teritorial komunalisme. Oleh karena terbius oleh gagasan Barat modern, mereka ingin mewujudkan kebebasan individu yang terkerangka dalam kontrak-sosial yang disebut sebagai Konstitusi.¹⁵ Singkatnya, mereka menginginkan suatu tatanan-politik nasional yang bertolak dari hasil konsensus individu-individu yang bebas dan mandiri. Semuanya terpulang pada warganegara. Bila suatu saat para warga negara, melalui suatu proses yang demokratis, menginginkan suatu bentuk negara kesatuan, maka bentuk itulah yang menjadi kebijakan publik. Nasionalisme bagi mereka adalah wadah mewujudkan kemanusiaan. Nasionalisme hanyalah alat, bukan landasan dan tujuan utama. Dalam berbagai manuver politik, Sutan Syahrir, sebagai tokoh pemikir sosial, yang arah politiknya diketahui dan disetujui Bung Hatta, selalu berusaha mengedepankan kemajemukan kemanusiaan di atas obsesi persatuan dan

¹⁴ Menurut Tamrin Amal Tomagola, pemikiran Soepomo sebenarnya mengambil konsepsi Negara Hegelian, yakni membayangkan suatu tatanan negara sebagai perwujudan nilai-nilai luhur komunal/kekeluargaan. Negara yang dibayangkannya adalah suatu komunitas teritorial yang dicita-citakan (*imagined community*). Konstruksi tatanan semacam itu oleh Soepomo dipertemukan dengan ide kekeluargaan dari pemikiran Timur.

¹⁵ Pemikiran berbasis sosial terpengaruh oleh konsep negara modern demokratis pemikiran John Locke yang menyatakan bahwa konstitusi negara dibentuk oleh individu-individu yang bebas demi kepentingan umum.

kesatuan nasional.

Di saat-saat menjelang proklamasi kemerdekaan, kelompok berbasis pemikiran komunal ternyata lebih berperan dalam perumusan UUD 1945. Warna dasar dari UUD '45 adalah warna asas kekeluargaan integralistik yang patriarkal. Konsep ini selaras dengan pemahaman dalam umat beragama, di mana para pemimpin, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara diberi peranan utama yang menentukan untuk mengatur masyarakat. Rakyat sebagai kawula, secara budaya dan moral, dituntut untuk selalu patuh kepada para pemimpinnya dan menyisihkan kepentingan individunya. Asas kekeluargaan dan religiusitas inilah yang menjadi jati diri dasar dari Pancasila.¹⁶

Bertolak dari hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dituangkan dalam UUD 45 adalah sesuatu landasan yang lebih mengutamakan keseluruhan dengan konsekuensi bentuk negara adalah Negara Kesatuan RI dan di mana yang memegang peranan penting adalah para pemimpinnya dan bukan rakyat. Feodalisme kemudian ikut masuk mewarnai cara kepatuhan yang total dari rakyat. Kompromi paling maksimal yang dapat dicapai dalam rumusan UUD 1945 dalam upaya memecahkan dilema antara pengakuan kedaulatan rakyat di satu pihak dengan kecenderungan dominasi elit pemimpin di pihak lain adalah suatu rumusan demokrasi khas Indonesia yang berbunyi: "*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.*" Hikmat kebijaksanaan hanya dapat dimiliki oleh para pemimpin saja dan bukan rakyat. Elitisme dari rumusan tersebut sangat jelas bahwa mereka yang memiliki hikmat kebijaksanaan adalah yang memimpin rakyat. Hasil akhirnya, seperti yang terjadi dalam Orde Baru di mana lembaga DPR bukanlah rumah bagi rakyat tetapi rumah sebuah rezim.

Sejarah Indonesia selanjutnya banyak ditentukan oleh silih-bergantinya dan jatuh-bangunnya dominasi kedua kelompok tersebut. Apabila kelompok pertama yang menang maka yang terjadi adalah suatu kehidupan non-demokratik yang otoriter. Masa-masa tersebut adalah masa-masa Demokrasi Terpimpin di era Orde Lama dan masa-masa Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Namun sebaliknya, apabila kelompok kedua yang sedang berada di atas angin, maka panggung sejarah Indonesia diwarnai oleh kehidupan demokratik-konstitusional. Masa-masa tahun 1950-an sampai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan masa-masa sesudah sidang umum MPR Oktober 1999 sebagai dimulainya era Reformasi hingga saat ini sebenarnya menunjukkan suatu kehidupan demokratik yang konstitusional.

Pemerintahan demokratik-konstitusional yang mengacu pada UUDS 1950 waktu itu sebenarnya sudah mulai berlangsung namun karena tatanan dasar kemasyarakatan Indonesia belum berubah saat itu, yang pada dasarnya masih bersifat komunal kedaerahan dan agama, maka tatanan politik saat itu akhirnya lebih memunculkan kekuatan-kekuatan kedaerahan dan aliran yang sangat bersifat

¹⁶ Thamrin, *Op.Cit.*

sektarian. Politik *dagang sapi* banyak mewarnai politik masa itu. Para pemimpin sibuk memperebutkan kursi kekuasaan sehingga lupa pada pembangunan *nation building*.

Orde Lama yang didukung oleh kelompok pertama yang komunal-paternalistik menurut Tamrin, tidak juga membangun *nation building*, merubah tatanan masyarakat secara substansial melalui perubahan struktural kemasyarakatan. Yang dilakukan oleh Orde Lama justru adalah upaya membangun negara pada tataran ideologis. Dengan mesin indoktrinasi yang kuat, rasa kebangsaan mau dibangun di atas suatu *pepesan kosong* ideologis. Hal tersebut merupakan kesalahan sejarah pertama dari kelompok pertama yang mengutamakan komunalisme negara.

Kesalahan sejarah kedua dari kelompok komunalisme negara adalah terjadi pada masa Orde Baru. Mereka berhasil melaksanakan pembangunan nasional namun tidak merata di semua wilayah dan lapisan masyarakat. Dalam banyak hal, terutama di daerah dan di masyarakat daerah, pembangunan nasional justru berarti bencana nasional bagi rakyat. Kekeliruan Orde Baru terjadi karena di satu pihak, mereka telah merelakan diri menjadi kaki-tangan pemodal internasional, dan di lain pihak, mereka menekan dan bertindak keras terhadap rakyat dan daerah dikuras kekayaannya melalui represi militer.¹⁷

Dari aspek orientasi pemikiran, Orde Baru sebenarnya tidak berbeda secara mendasar dengan Orde Lama. Kedua-duanya sama-sama berasal dari kelompok yang berorientasi komunal, baik mereka yang berada dalam jajaran sipil maupun yang berkiprah dalam bidang militer. Setiap bentuk perbedaan, setiap keanekaragaman dipandang sebagai ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara. Semua perbedaan kepentingan harus dibrangus dan dihilangkan demi kepentingan nasional dan stabilitas nasional. Obsesi nasionalisme yang membus rezim militer Orde Baru telah menghasilkan berbagai kerusuhan sosial di era transisi yang menjurus pada jurang disintegrasi bangsa dan negara.

Orde Reformasi yang dipimpin oleh Habibie yang seorang teknokrat, cenderung sangat mengadopsi pemerintahan kelompok sosial demokratis, berbau paham sekularisme yang menekankan kebebasan individu sehingga wilayah Propinsi Timor-Timur akhirnya lepas dari NKRI melalui apa yang disebut sebagai Referendum. Dalam hal ini, komunalisme agama dan etnis menunjukkan kekuatannya atas komunalisme negara. Era Gusdur dan Megawati melanjutkan tatanan orde Reformasi yang menguatkan pengutamaan hak-hak azasi manusia dengan salah satunya mengangkat martabat umat Konghucu dan liberalisme di bidang ekonomi. Era Reformasi membuka kebebasan yang luas bagi berkembangnya komunalisme sektarian, agama dan etnis untuk mengekspresikan dirinya dan komunalisme sek-

¹⁷ Nampaknya rezim Orde Baru memanfaatkan bentuk komunalisme negara demi kelompoknya dan kronikroninya dan dijalankan secara feodal. Prinsip kekuasaan feodal adalah untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran, kepuasan dan kejayaan penguasa dan keluarga atau kelompoknya. Rudiaji Mulya, Feodalisme dan Imperialisme di era Global, Jakarta: Elex media Komputindo, 2012, hlm. 145.

tarian semacam itu ternyata berusaha merebut ruang-ruang publik dan kebijakan publik yang dikuasai oleh komunalisme negara Indonesia. Kebutuhan dasar dari penduduk Indonesia memang dapat dipenuhi oleh rezim Orde Baru, namun biaya kemanusiaan yang harus dibayar terlalu tinggi sehingga akhirnya tidak bertanggung lagi oleh rakyat, sehingga dampaknya, di era Reformasi, komunalisme agama dan etnis menang di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di wilayah Aceh dan Irian Jaya dalam bentuk otonomi-otonomi khusus.

Era kepemimpinan SBY dan Jokowi menunjukkan dominasi komunalisme negara yang memberi ruang demokrasi berkembang dengan subur. Adanya Pemilu secara langsung, menguatnya KPK (komisi Pemberantasan Korupsi) dan usaha-usaha pemerataan pembangunan menunjukkan suburnya demokrasi yang menjunjung tinggi hak semua warga negara dalam kebijakan publik. Dalam masa tersebut, mulai marak pengaruh radikalisme agama akibat pengaruh politik internasional yang menguatkan komunalisme agama dan etnis di Indonesia. Komunalisme agama dan etnis semakin menguat dan nampak dalam kasus-kasus: penistaan agama oleh Ahok, penggunaan jargon pribumi-non pribumi, Aseng-Asing, menguatnya OPM (organisasi Papua Merdeka), penyegelan beberapa rumah ibadah, perusakan rumah ibadah dan lainnya. Pada sisi yang lain, komunalisme negara sedang di kuatkan oleh pemerintahan Jokowi dengan revolusi mental, gerakan gotong royong dalam program BPJS, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia sehat, dana desa dan lainnya.

5. Komunalisme dan Kebijakan Publik

Komunalisme yang menjunjung tinggi kepentingan umum di atas kepentingan golongan dan individu sebenarnya lebih memudahkan dalam mengesahkan berbagai peraturan dan rancangan hukum perundangan yang mengatur kehidupan bersama. Paham komunalisme dalam konstitusi Indonesia yang menjunjung tinggi peran pemimpin menjadi peluang bagi pemimpin membuat kebijakan publik secara subjektif. Apa yang disetujui oleh kelompok elite dan pemimpin bangsa akan mudah untuk dipatuhi oleh warga negaranya. Komunalisme dapat memberi ruang pada ekspresi dan pendapat setiap individu, namun pada akhirnya apa yang digagas dan diputuskan oleh negara dan para pemimpinnya tetap harus menjadi yang diutamakan dalam setiap keputusan dan kebijakan publik.

Komunalisme Indonesia sarat dengan gagasan ketimuran yang menempatkan negara sebagai komunitas dan pemimpin negara sebagai yang harus diutamakan dan dipatuhi. Gagasan tersebut seolah menafikan gagasan negara demokrasi modern yang menjunjung tinggi hak-hak individu dan kebebasannya berserikat, berkumpul dan menyuarakan pendapat. Dalam konteks negara Indonesia, komu-

nalisme negara nampaknya menjadi semacam cangkang telur yang berisi berbagai komunalisme agama dan etnis. Beberapa pasal dalam UUD 1945 dan amandemennya jelas menunjukkan adanya perlindungan terhadap individu, namun sebagian besar pasal-pasal dalam UUD 1945 berisi tentang paham komunalisme. Dalam praktek hidup bernegara, seruan “*NKRI harga mati*” merupakan jargon demi terbangunnya rasa komunalisme negara, namun di sisi lain di tingkat akar rumput, masyarakat masih hidup dalam gagasan komunalisme agama dan etnis yang hegemonya semakin lama dapat menggerogoti komunalisme negara. Dewasa ini, komunalisme agama dan etnis di Indonesia menjadi lawan dari komunalisme negara dengan menggunakan dalih-dalih argumen paham demokrasi modern yang mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan umum. Pergulatan paham komunalisme negara dengan komunalisme agama dan etnis nampak dalam terbitnya berbagai produk hukum di negara Indonesia seperti perda-perda otoda, UU pemilu, dan lainnya yang mengutamakan kepentingan golongan tertentu di atas kepentingan nasional.¹⁸ Produk hukum dan perundang-undangan yang ada saat ini nampak masih belum memuaskan sebagian warga negara karena produk hukum tersebut masih bernuansa sektarian dan demi komunalisme agama dan etnis tertentu.

Komunalisme agama dan etnis yang dibawa dalam ranah perpolitikan menjadi cara berpolitik yang menekankan identitas tertentu untuk memperoleh kekuasaannya, yang dikenal sebagai *politik identitas*. Politik identitas dengan memanfaatkan komunalisme agama akhir-akhir ini menjadi *trending topic* di media sosial karena digunakan secara vulgar oleh para elite politik untuk meraih kekuasaannya. Paham komunalisme agama dimanfaatkan dalam politik praktis untuk menekan dan mengalahkan pesaing yang berbeda identitas agamanya nampak dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu dan di beberapa wilayah Indonesia lainnya. Paham komunalisme agama digunakan untuk menggiring opini masyarakat, merajut kekuatan massa dan menghakimi lawan politik dari kelompok yang berbeda dengan cara-cara membuat pengerahan massa atas nama agama tertentu, gerakan perusakan patung ibadat dan rumah ibadah, pengusiran kelompok minoritas Ahmadiyah dan Syiah yang dinilai bertentangan dengan ajaran agama, dan beberapa kasus lainnya. Radikalisme agama menancapkan pengaruhnya di negara Indonesia dengan memanfaatkan paham komunalisme agama dengan menghadirkan penampilan yang khas berupa atribut baju agamis dan warna yang seragam untuk membangun rasa kolektif kelompok, menyebarluaskan kotbah dan ajaran, serta penggalangan massa dengan acara-acara yang spektakuler dan heboh seperti demo, sweeping di bulan puasa dan lainnya. Paham komunalisme etnis digunakan dalam politik praktis dengan menggunakan isu pribumi-non pribumi, isu Jawa-luar Jawa, isu pemekaran wilayah propinsi dan kabupaten, isu pemerataan pembangunan dan lainnya.

¹⁸ Lih. Antonius Widyarsono, “Peta Permasalahan Pancasila Dewasa ini”, Driyarkara: Jurnal Filsafat, thn.xxxii no 3/2011, Jakarta, hlm. 9.

Pemanfaatan paham komunalisme di Indonesia dewasa ini sedang mengarah pada kekuatan komunalisme agama dan etnis untuk tujuan: pertama, menekan pemerintahan yang sah agar mengubah dan merevisi beberapa kebijakan publik yang tidak sesuai dengan kepentingan komunitas dan golongan tertentu. Kedua, mempengaruhi masyarakat yang labil dalam identitas komunalnya untuk memilih identitas komunalnya dan ketiga, mempengaruhi masyarakat dengan hegemoni agama untuk menerima, mengikuti dan merestui paham-pahamnya dalam mendominasi kelompok yang berbeda serta mempengaruhi pertimbangan para pembuat kebijakan publik untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan kelompoknya. Keempat, dengan kekuatan komunalisme agama yang terus-menerus di unggah di media sosial nantinya akan mempengaruhi seluruh masyarakat untuk mengubah tatanan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia agar sesuai dengan agenda kepentingan politik kelompoknya. Pembangunan hegemoni semacam itu yang akhir-akhir ini marak di Indonesia adalah kegiatan tagar ganti presiden, kampanye Indonesia bersyariah, Demo khilafah Indonesia dan lainnya yang pada akhirnya bukan hanya mempengaruhi pembuatan kebijakan publik saja namun sampai pada pengaruh untuk mengubah sistem kenegaraan dan konstitusi negara Indonesia yang berbasis komunalisme negara sejak ditetapkan pada tahun 1945 dengan sistem kenegaraan yang baru berdasarkan komunalisme agama tertentu atau etnis tertentu.

6. Refleksi Kritis

Komunalisme sebagai sebuah paham merupakan salah satu aspek pemikiran tentang manusia yang hakekatnya adalah makhluk komunal, makhluk yang membutuhkan hidup dalam suatu kelompok. Komunalisme menjadi sangat berperan dalam kehidupan seseorang karena komunalisme membentuk identitas dan jati diri seseorang di dalam kelompoknya. Komunalisme mengarahkan seseorang untuk terus menyelaraskan kepentingan individunya untuk sesuai dan sejalan dengan kepentingan kelompoknya.¹⁹ Komunalisme menempatkan identitas kelompok dan segala kepentingannya menjadi identitas dan kepentingan semua anggotanya. Paham komunalisme Timur menjadi kuat karena memiliki aspek adi-kodrati yang menempatkan pemimpin sebuah kelompok menjadi penentu arah dan gerak kelompok yang senantiasa harus ditaati dan dipatuhi oleh anggotanya. Komunalisme Barat merupakan sebuah tahapan proses dari individu menuju kepada negara atau masyarakat yang lebih luas. Komunalisme Barat masih memperhitungkan gerak

¹⁹ Otto Gusti Madung memperingatkan bahwa komunalisme mengandung nilai-nilai etika partikular yang menegasi universalitas moral. Dengan demikian kedudukan martabat manusia sebagai individu dalam komunalisme tidak diperhatikan dan dikalahkan oleh nilai dan keutamaan komunal. Otto Gusti Madung, "Martabat Manusia sebagai Basis Ertis Masyarakat Multikultural", *Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi*, Volume 11, Nomor 2, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Oktober 2012, hlm. 160-173.

kebebasan individu dalam berkelompok, sebaliknya, komunalisme Timur cenderung meniadakan identitas individu. Komunalisme Timur bersifat paternalistik dan feodalistik, karena pemimpin kelompok dianggap memiliki hikmat kebijaksanaan yang lebih dibandingkan semua anggotanya, sehingga pemimpin dan pemuka agama menjadi panutan dan rujukan bagi segala masalah kehidupan. Bentuk komunalisme Timur dapat mengarah pada paham totalitarianisme yang menekankan kebijakan publik secara represi demi kepentingan umum di atas kepentingan individu dan golongan.²⁰

Komunalisme di Indonesia membentuk identitas kebangsaan Indonesia sejak awal berdirinya melalui para *founding fathers*-nya. Negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila berlandaskan paham komunalisme negara yang khas berciri komunalisme Timur yang berbeda dengan bentuk negara komunalisme Barat yang menganut asas sekularisme dan sosialis-humanisme. Komunalisme negara Indonesia nampak jelas tertuang dalam dasar negara dan UUD 1945, yang menganut sistem presidensial dan pengutamaan kepentingan umum yang diatur oleh negara demi kemakmuran rakyat.

Komunalisme negara Indonesia mengandung di dalamnya komunalisme agama dan etnis, sehingga bentuk komunalisme sektarian dan primordial (suku, agama, ras) hidup dan tumbuh dalam cangkang komunalisme negara. Dewasa ini, komunalisme sektarian agama dan etnis berkembang dan berusaha untuk merongrong dan menguasai komunalisme negara dengan menggunakan dalih demi hak-hak azasi manusia, kebebasan individu dan lainnya yang *notabene* berasal dari paham demokrasi modern yang sangat berlawanan dengan paham komunalisme. Di sisi lain, komunalisme negara Indonesia telah dibangun secara serampangan akibat menguatnya komunalisme sektoral dan agama dengan alasan demi keutuhan negara dan bangsa Indonesia

Belajar dari pemikiran Gramsci, negara Indonesia yang dibangun dalam kontitusi yang berbasis komunalisme negara perlu mewaspadaai berbagai sepaq terjang komunalisme sektoral, agama dan etnis yang hidup di dalam negara Indonesia dewasa ini. Komunalisme agama nampaknya sedang mengupayakan hegemoninya secara masif dalam masyarakat umum untuk dapat diterima pengaruhnya tanpa konflik (model infiltrasi), untuk tidak dipermasalahkan doktrin dan ajarannya tentang konsep negara dan kepemimpinan negara, sehingga hegemoni komunalisme agama yang semakin kuat nantinya akan secara perlahan menguasai bidang politik dan militer dengan agenda akhir mengubah konstitusi negara menjadi konstitusi yang berbasis komunalisme agama tertentu. Hegemoni komunalisme agama telah dibangun dan disemai melalui berbagai bidang kehidupan yakni pendidikan, ekonomi, sosial, politik, agama dan budaya. Pembudayaan pakaian agamis dalam

²⁰ Totalitarianisme sebenarnya merupakan sebuah produk modernitas. Krisis setelah Perang Dunia pertama menciptakan kondisi lahirnya bentuk totalitarianisme seperti fasisme di Jerman, Italia dan Perancis. Lih. Frederick Powell, *Op.Cit.*, hlm. 88.

hidup sehari-hari yang secara perlahan telah menyingkirkan pakaian adat budaya menunjukkan menguatnya pengaruh hegemoni komunalisme agama. Bentuk-bentuk lainnya adalah suburnya lembaga pendidikan yang bersifat eksklusif hanya menerima murid yang seagama saja, perda-perda yang berbasis hukum agama tertentu. Bahkan gerakan demonstrasi yang nampak sporadis namun berlangsung terus-menerus dan masif menyuarakan pergantian sistem kepresidenan menjadi sistem khilafah merupakan usaha menguatkan hegemoni komunalisme agama tertentu dalam kehidupan masyarakat umum agar paham idealisme yang bertentangan dengan kontitusi negara Indonesia menjadi terbiasa untuk dikenal, didengar, diterima oleh khalayak umum. Hal yang dianggap sebagai paham berbeda dianggap bukan sebagai ancaman bagi konstitusi dan keutuhan negara. Pembiasaan (pembudayaan) merupakan strategi membangun hegemoni, demikian menurut Gramsci, dan hal tersebut jelas akan mengikis nalar sehat manusia karena berlangsung masif dalam hidup sehari-hari.

Beberapa Kebijakan publik yang ada di Indonesia merupakan produk politik yang dipengaruhi oleh hegemoni komunalisme. Terbitnya kebijakan publik berupa UU otonomi daerah, daerah khusus dengan pengaturan yang khusus merupakan hasil menguatnya komunalisme agama, etnis dan budaya, termasuk produk hukum sebagai turunannya seperti perda-perda syariah, perda-perda daerah khusus dan sejenisnya. Komunalisme agama dalam bentuk parlemen jalanan, pengerahan massa dan demonstrasi yang masif di Indonesia nampak telah mampu mempengaruhi para pembuat kebijakan publik dalam menerbitkan berbagai peraturan. Beberapa kasus di bidang hukum menunjukkan adanya kebijakan pemerintah yang cenderung tidak adil dan memihak pada kelompok penekan.

Mensikapi perkembangan hegemoni komunalisme agama yang masif di Indonesia dewasa ini, yang telah banyak mempengaruhi kebijakan publik, maka pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia seharusnya bersikap tidak tinggal diam dan mengalah dalam menanggapi desakan hegemoni komunalisme dengan alasan hanya demi ketentraman dan kenyamanan hidup bersama.²¹ Pemerintah negara Indonesia perlu menguatkan paham konstitusinya yang dianggap mampu mengadopsi kepentingan semua kelompok dan golongan yang majemuk dan heterogen di Indonesia. Pemerintah perlu membangun hegemoni komunalisme negara dalam hidup sehari-hari sekaligus bersikap tegas membatasi hegemoni komunalisme jenis apapun yang ingin mendominasi dan yang akan mengubah konstitusi negara Indonesia. Rakyat Indonesia perlu memiliki kesadaran yang kuat akan konstitusi negaranya sendiri, yang telah dibangun bukan berdasarkan paham komunalisme Barat atau individualisme Barat. Rakyat Indonesia harus diberdayakan untuk

²¹ Bdk. H.A. Prayitno dan Trubus, *Etika Kemajemukan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2004, hlm. 291. Hal yang tidak perlu dilakukan adalah melebur kebenaran masing-masing, memaksakan pihak lain yang berbeda pandangan dan ideologi, menggeneralisir setiap perbedaan dan lain sebagainya dengan dalih ingin hidup bersama dalam perdamaian.

mengaktualisasi paham komunalisme negaranya dengan bentuk-bentuk kehidupan yang khas sesuai dengan adat kebudayaannya sendiri. Apabila tidak diantisipasi sejak dini, menguatnya hegemoni komunalisme tertentu atas negara pada akhirnya akan mengubah sendi-sendi hidup negara Indonesia dan secara perlahan akan menghilangkan keanekaragaman adat budaya suku bangsa di Indonesia. Dengan demikian, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: Pertama, pemerintah dan rakyat Indonesia perlu kembali mengevaluasi berbagai kebijakan publik yang tidak selaras dengan kontitusi negara Indonesia. Kedua, pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia perlu menghidupkan dan menghidupi paham komunalisme negara Indonesia seperti yang tertuang dalam konstitusi negara sebagai semangat menghidupkan nilai-nilai nasionalisme, kebangsaan, kesatuan, keIndonesiaan, kebhinekaan, kegotong-royongan dan sejenisnya. Ketiga, menyadari bahwa konstitusi negara Indonesia memiliki pendasaran komunalisme yang menjunjung tinggi pemimpin negara sebagai panutan, maka kualitas para pemimpin dalam pemerintahan, elite partai dan wakil rakyat perlu mendapatkan perhatian. Dengan realitas keberagaman di Indonesia yang didukung oleh konstitusi yang berbasis komunalisme Timur maka pemimpin Indonesia haruslah pemimpin yang kuat dan adil bagi semua kelompok dan golongan. Kepemimpinan di Indonesia dapat bergaya totalitarianisme persuasif-non otoriter, mengutamakan kepentingan negara di atas semua kepentingan kelompok dan golongan.

Di era yang mengedepankan demokrasi modern dan kuatnya pengaruh liberalisme, sebenarnya paham komunalisme negara tetap dapat dikembangkan kualitas bentuknya melalui pembangunan kesadaran hak dan tanggungjawab sebagai warga negara, pendidikan wawasan kebangsaan dan nasionalisme, pendidikan bela negara, pendidikan multikulturalisme dan sejenisnya.

7. Penutup

Komunalisme sangat berkaitan dengan kebijakan publik karena komunalisme selalu mengatasnamakan demi kepentingan umum dalam membuat kebijakan publik dan komunalisme menuntut ketaatan semua warga negara untuk melaksanakan kebijakan publik. Komunalisme di Indonesia bukanlah representasi kesadaran setiap individu atas hak dan kewajibannya, melainkan representasi identitas komunal/komunitas, sehingga siapa yang menjadi pemimpin dan tokoh komunal akan menentukan kebijakan publik. Komunalisme negara Indonesia dewasa ini dirongrong oleh menguatnya hegemoni komunalisme agama dan etnis sehingga beberapa produk kebijakan publik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi warga negaranya karena beberapa telah condong pada kepentingan kelompok tertentu. Bentuk-bentuk komunalisme agama dan etnis dalam komunalisme negara perlu dikelola dengan baik demi tujuan kepentingan umum yang lebih luas.

Komunalisme negara Indonesia perlu dikuatkan melalui penguatan konstitusi dan berbagai produk hukum turunannya serta melalui pembangunan *nation building* yang tepat. Dewasa ini, kebutuhan *Nation Building* yang perlu dibangun bukanlah pada tataran pemahaman ideologi negara tetapi terpenting adalah pada kesadaran warga negara akan eksistensi dan realitas kemajemukan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan komunal, dalam pemahaman yang mendalam akan *Bhinneka Tunggal Ika*, berbeda-beda namun tetap satu jua. Di sisi lain, suatu upaya *nation building* hanya akan berhasil apabila seluruh wilayah dan seluruh lapisan bangsa turut mendapat bagian secara adil dari semua hasil hidup bernegara dan berbangsa, seperti yang tertuang dalam sila ke lima Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila hal-hal tersebut tidak terjadi, maka bentuk negara dan tata-cara pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara harus ditinjau kembali.

Daftar Pustaka

- Powell, Frederick, *The Politics of Civil Society*, Bristol UK: The Policy Press of University of Bristol, 2007.
- Hardiman, F., (ed), *Ruang Publik*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Moedjanto, G., M.A., *Konsep Kekuasaan Jawa*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Prayitno, Trubus, H.A. , *Etika Kemajemukan*, Jakarta: Penerbit Universitas Tri sakti, 2004,
- Mulya, Rudiaji, *Feodalisme dan Imperialisme di era Global*, Jakarta: Elex media Komputindo, 2012.
- Tomagola, Thamrin Amal, *Nasionalisme, dalam Haribaan Komunalisme Indonesia*, Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, dalam laman: <http://www.komunitasdemokrasi.or.id/id/berita/121-komunalisme-berbaju-nasionalisme>, diunduh pada tanggal 30/09/2018.
- _____, *Sejarah kebangkitan Nasional Jawa Timur*, Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 1978.
- Madung, Otto Gusti, “Martabat Manusia sebagai Basis Ertis Masyarakat Multikultural”, *Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi*, Volume 11, Nomor 2, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Oktober 2012, hlm. 160-173.
- Widyarsono, Antonius, “ Peta Permasalahan Pancasila Dewasa ini”, *Driyarkara: Jurnal Filsafat*, thn.xxxii no 3/2011, Jakarta, hlm. 5 -15.